



PRODI ADM PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO

2022



DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S1)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4687/UN28/KR/2023

TENTANG

**PENETAPAN KURIKULUM *OUTCOME-BASED EDUCATION* MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui surat nomor 3055/UN28.1.13/PD/2023 tanggal 6 April 2023 mengusulkan penetapan kurikulum *Outcome-Based Education* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
- b. bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam rangka menghasilkan generasi yang handal dan kompeten serta berdaya saing tinggi perlu ditetapkan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis *Outcome-Based Education* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kurikulum *Outcome-Based Education* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

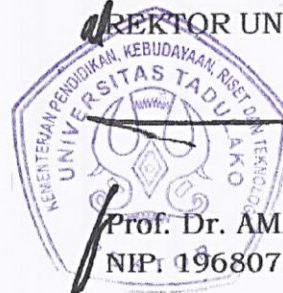
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM *OUTCOME-BASED EDUCATION* MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Kurikulum *Outcome-Based Education* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2022/2023. ✓

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. AMAR, S.T., M.T.

NIP: 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.

DOKUMEN

PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Nama Ketua Tim	: Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si
NIDN	: 00-1012-6809
Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: FISIP
Universitas	: Universitas Tadulako

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
Tahun 2022

DAFTAR ISIIDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Tadulako ☒ PTN ☐ PTS
2	Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Administrasi
4	Program Studi	Administrasi Publik
5	Status Akreditasi	B
6	Jumlah Mahasiswa	
7	Jumlah Dosen	52
8	Alamat Prodi	Jl. Soekarno Hatta – Km 9. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94118
9	Telpn	(0451) 422 611-422 355
10	Web PRODI/PT	https://iap.fisip.untad.ac.id/

I. LANDASAN KURIKULUM

1.1. Landasan Filosofis

Secara hakikih muqadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Landasan filosofis ini memberikan pedoman pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

1.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pebelajar (Ornstein & Hunkins,

2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebudayaan difahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (group knowledge) (Ross, 1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri (capsulation) yang bias, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan untuk memahami kebudayaan yang lain nya (Zais, 1976, p. 219).

Berdasarkan dinamika dan perkembangan budaya di masyarakat *Public Administration* tidak lagi cocok diterjemahkan ke dalam administrasi negara karena proses pembuatan kebijakan publik, pemberian layanan jasa dan pengelolaan pelayanan publik tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan oleh *stakeholders* lainnya seperti (masyarakat sipil/aktor non-negara) seperti sektor swasta, badan otonom semi pemerintah dan LSM. Penggunaanya juga bukan hanya lembaga-lembaga pemerintah melainkan lembaga non- pemerintah. Demikian juga isu-isu kebijakan bukan hanya domain kekuatan internal birokrasi dan politik dalam pemerintahan tetapi menyangkut keterlibatan dan keterlibatan organisasi di luar pemerintahan

Oleh karena itu Pendidikan merupakan bagian dari transformasi budaya, yang berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Olehnya kurikulum Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako juga harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, karakteristik dan kearian lokal, nilai-nilai kenusantaraan, kultur budaya bangsa Indonesia, perkembangan IPTEKS serta tuntutan dan dinamika global.

1.3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat, kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi

kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945. Dalam bidang Administrasi Publik, suatu kurikulum diharapkan dapat melahirkan profil lulusan yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan publik yang ditandai adanya sikap, ketrampilan dan pengetahuan sesuai ciri dan kompetensi dari seorang Administrator publik yang berwawasan dan berorientasi *Publicness Values, needs and Problems*.

1.4. Landasan Historis

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jaman; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar;

Olehnya dari perspektif historis, perubahan kurikulum di perguruan tinggi termasuk Prodi Administrasi Publik FISIP Untad merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dinamika *Public Administration scientific vision* yang mengacu pada perspektif keilmuan kelembagaan ilmiah dan profesional bidang administrasi publik seperti *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)*, *Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA)*, *United Nation Public Administration Networking (UNPAN)*, *Minnowbrook Agenda* (sebagai basis utama tradisi perkembangan paradigma dan *trend Issue* Administrasi Publik global) *National policy changes*, kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Kurikulum yang diharapkan mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 dan society 5.0, yang memiliki kemampuan literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*); literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; serta keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility serta mampu membaca dan menerapkan esensi perkembangan dan dinamika Perspektif/Paradigmatik dalam bidang Ilmu Administrasi publik.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4166/UN28/KP/2019 tentang Rencana Startegis Universitas Tadulako 2020-2040.
11. Rencana Strategis FISIP Untad 2020-2024
12. Rencana Strategis/Visi Misi Program Studi Ilmu Administrasi Publik 2020-2024
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Penetapan Tmmpelaksana program/kegiatan Program studi administrasi publik yang bersumber dari DIPA Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tadulako tahun anggaran 2022, Lampiran-I tentang Komposisi Tim Pelaksana Lokakarya Revisi Kurikulum Program Studi Administrasi Publik Tahun 2022.

14. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
15. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.

II. HASIL EVALUASI KURIKULUM YANG SEDANG BERJALAN

Kurikulum Program Studi S1 Administrasi Publik yang saat ini digunakan adalah kurikulum tahun 2016. Kurikulum ini berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2016-2022 dan merupakan hasil pengembangan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang berorientasi pada kompetensi. Namun demikian, seiring perubahan kebijakan dan dinamika perguruan tinggi maka perlu upaya pembaharuan kurikulum untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang utamanya yang berorientasi Outcome Based Education (OBE), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maupun. Untuk itu berikut tahapan yang harus dilalui dalam proses pembaharuan kurikulum:

1. Melakukan Batch Marking terhadap sesama program sejenis yaitu Program Studi S1 Administrasi Publik/Negara.
2. Melakukan penyesuaian capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan asosiasi program studi dalam hal ini *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)*.
3. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Bersama Stakeholder terkait seperti alumni, pengguna alumni dari sektor pemerintahan, Swasta hingga Non-Government Organization (NGO).
4. Melakukan diskusi non formal yang mengundang mahasiswa, alumni yang sedang lanjut ke jenjang S2 serta alumni yang sudah bekerja terkait kualifikasi yang mereka butuhkan di dunia kerja.

Dari proses tersebut kemudian ditemukan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum ini diantaranya:

1. Terpenuhinya kebutuhan/tuntutan dunia kerja yang lebih profesional
2. Pengembangan Capaian Pembelajaran yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika di masyarakat.
3. Peningkatan kualifikasi dan Standar Kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan nasional hingga internasional.

III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

4.1. VISI

Pernyataan Visi Program Studi dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan isu-isu strategis secara eksisting program Studi dan Kajian Administrasi Publik, baik secara global, nasional maupun lokal (Sulawesi Tengah) serta mempertimbangkan Visi Universitas Tadulako 2020-2040 yang menyatakan: **“Universitas Tadulako Menjadi Perguruan Tinggi yang Berstandar Internasional dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup”**.

Berangkat dari hal di atas, maka Visi Program Studi Administrasi Publik FISIP Untad periode 2022-2027 dinyatakan:

“Unggul dan berdaya saing dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada bidang Ilmu Administrasi Publik pada tingkat Nasional dan Internasional”.

4.2. MISI

Adapun Misi tertuang ke 7 poin utama diantaranya:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola Kelembagaan dan SDM Program Studi berbasis Good University Governance, IPTEKS, Smart Campus Governance, Global Trend, kolaborasi Pentahelix dan Public Value.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang ilmu Administrasi Publik, (*Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Governansi, Kearifan Lokal Nusantara dan Inovasi sektor Publik ?*).
- 3) Melaksanakan Penelitian di bidang ilmu Administrasi Publik, (*Kebijakan, Manajemen, Pelayanan Publik, Governansi, kearifan Lokal Nusantara dan Inovasi sektor Publik ?*) untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Pembangunan Nasional dan kemajuan bangsa.
- 4) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat di bidang Administrasi Publik, (*Kebijakan, Manajemen/Pelayanan Publik, Governansi, Kearifan Lokal Nusantara dan Inovasi sektor Publik-?*) untuk Kemaslahatan dan kemajuan Bangsa.
- 5) Menghasilkan lulusan yang unggul, memiliki daya saing dan mempunyai kompetensi ilmu administrasi publik yang bermartabat, berkarakter, berintegritas *berkarakter (dimaksudkan: Memiliki*

Integritas Keilmuan, Kebangsaan, Keagamaan, Kemanusiaan/Kepublikan yang tinggi-?) di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- 6) Membangun jaringan kerjasama dengan ragam pihak dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Administrasi Publik untuk kemajuan peradaban dan pemecahan masalah publik.
- 7) Menjadi Program Studi untuk Pengembangan dan Penerapan Uji Kompetensi Profesionalitas SDM di bidang Administrasi Publik

4.3. TUJUAN

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM Program Studi yang Profesional, akuntabel, transparan, Demokratis dan adaptif dengan perkembangan IPTEKS/SMART Campus Governance, Global Trend, Perubahan Sosial, Public Value.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM Program Studi Berbasis Mutu Berkelanjutan dan Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi/KKNI dan Standar Mutu Global.
3. Menghasilkan Sarjana Ilmu Administrasi Publik yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEKS dalam bidang Ilmu Administrasi Publik (*mencakup kebijakan publik, manajemen publik, Manajemen/Pelayanan Publik, Nilai Kearifan Lokal Nusantara, Governansi dan Inovasi sektor publik serta Global Trend-?)* yang mampu bersaing di pasar kerja baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
4. Menghasilkan penelitian dan Karya Ilmiah yang berkualitas dalam bidang Administrasi Publik (*mencakup kebijakan publik, Manajemen/Pelayanan Publik, Nilai Kearifan Lokal Nusantara, Governansi dan Inovasi Sektor Publik serta Global Trend -?)* yang mendukung pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah-masalah publik.
5. Mempersiapkan Mahasiswa unggul, berdaya saing, berkarakter dan berintegritas yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan profesional di bidang Ilmu Administrasi Publik
6. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Administrasi publik (*baik melalui kajian kebijakan publik, manajemen/Pelayanan publik, Nilai Kearifan Lokal Nusantara, Governansi Inovasi sektor Publik dan Global Trend-?)* untuk pemecahan permasalahan publik melalui kerjasama secara Pentahelix, dengan mitra Lokal, nasional dan internasional.
7. Mengembangkan Kemitraan Synergis dan Profesional dengan ragam pihak dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Kajian dan Penerapan Administrasi Publik untuk kemajuan peradaban dan pemecahan masalah publik.

8. Berpartisipasi Aktif dalam Pengembangan, Penerapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Uji Kompetensi peserta didik dan alumni Sarjana Bidang Ilmu Administrasi Publik di tingkat Lokal dan Nasional.

4.4. SASARAN

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan diuraikan di atas, maka Prodi Administrasi Publik menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1) SASARAN BIDANG MANAJEMEN KELEMBAGAAN/SDM PRODI

- Diterapkannya Manajemen Kelembagaan/SDM Prodi Berbasis **GUG**, IPTEKS, *Smart Campus Governance*, *Global Trend Issues*, Kolaborasi *Penta Helix* dan *Public Value*.
- Adanya Standar Mutu dalam pelaksanaan Layanan Administrasi dan akademik Prodi.
- Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) pada semua jenis proses dan layanan Akademik Prodi.
- Dicapainya Nilai Akreditasi Unggul dari lembaga Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
- Adanya Sistem Rekrutmen Tenaga Dosen yang objektif dan profesional Secara dini dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan Mutu, Jumlah dan Kaderisasi Tenaga Dosen Berkualitas.
- Adanya Fasilitasi/Asistensi Kelembagaan yang membantu tenaga Pengajar untuk kenaikan Pangkat Fungsional, Publikasi Ilmiah, dan Administrasi Kepegawaian lainnya yang berbasis di tingkat Prodi.
- Terciptanya/terpeliharanya Atmosfir akademik yang kondusif dan paripurna di lingkungan Prodi.
- Adanya Sistem Pencegahan Kekerasan berbasis SARA, Gender, Perundungan dan Kekerasan seksual di Tingkat Prodi.

- Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi dan Akademik Mahasiswa.
- Tumbuh dan berkembangnya peran HIMAP dalam Pengembangan Co/Ektra Kurikuler Kajian Ilmu Administrasi Publik di tingkat Mahasiswa.

2) SASARAN BIDANG PENDIDIKAN/PENGAJARAN

- Meningkatnya kualifikasi dosen/Tenaga Pengajar melalui studi lanjut dan pelatihan.
- Meningkatnya kualifikasi Dosen/Tenaga Pengajar dari segi Kepangkatan Akademik.
- Meningkatnya Jumlah Peminat (calon mahasiswa) yang mendaftar/Memilih Program Studi
- Meningkatnya mutu proses pembelajaran.
- Tumbuhberkembangnya Mutu Jurnal Ilmiah yang dilelola oleh Program Studi.
- Berkembangnya Dialog Akademik Kritis/Dialog Ilmiah di Lingkungan Program Studi sesuai dengan Isu-isu terkini Lokal, Nasional maupun internasional.
- Adanya Sistem Perpustakaan/referensi Prodi Berbasis Digital yang bermuatan referensi Global dalam Kajian Administrasi Publik.
- Meningkatnya Proporsi Mahasiswa yang menyelesaikan Studi Tepat Waktu.

3) SASARAN BIDANG PENELITIAN

- Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh hibah-hibah penelitian baik hibah internal maupun eksternal (Untad, Dikbud Ristek, Pemda, Swasta, Lembaga Internasional dan lain sebagainya).

- Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah/hasil riset dari para Dosen dan/atau Dosen dan Mahasiswa pada jurnal nasional tidak/terakreditasi maupun pada jurnal internasional yang bereputasi.
- Meningkatnya Jumlah Buku Karya hasil karya Tulis Ilmiah Dosen yang berstandar ISBN/Unesco dan Dikti.
- Terbangunnya jaringan kerjasama secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Kajian/Penelitian lintas Stakeholders/jejaring Mutli Helix baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Adanya temuan Inovasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Program Studi.
- Adanya Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa yang berkualitas, bebas Plagiat dan memenuhi Standar Penulisan Ilmiah Umum.

4) SASARAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Meningkatnya jumlah hibah pengabdian kepada masyarakat yang diterima oleh Para Dosen di Lingkungan Prodi, baik hibah internal maupun eksternal (baik dari internal Untad, Dikbud Ristek, Pemda, Swasta maupun lembaga internasional)
- Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para Dosen pada jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi maupun pada jurnal internasional yang bereputasi.
- Terbangunnya Jaringan kerjasama berkelanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri.
- Terbangunnya jaringan kerjasama secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan lintas Stakeholders/jaringan *Pentahelix* baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- Adanya Peluang diterapkannya temuan Inovasi dari hasil penelitian/ kajian/pemikiran baik yang dilakukan oleh Dosen Program Studi dan/atau mahasiswa.

IV. PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

5.1. PROFIL LULUSAN

Perkembangan Industri serta teknologi yang kian pesat berimplikasi pada pilihan bidang kerja yang semakin beragam. Seorang Sarjana Administrasi Publik dapat bekerja tidak hanya pada birokrasi pemerintahan namun juga dapat merambah sektor lainnya yang berkaitan dengan urusan public. Terlebih saat ini tanggung jawab urusan public (public Affairs) juga telah terdistribusi pada Lembaga-lembaga non pemerintah, tempat sebagian besar alumni administrasi publik berkarir. Oleh sebab itu, Sarjana lulusan Program studi administrasi publik diharapkan dapat berkontribusi pada segala sektor yang relevan dengan bidang keilmuan khususnya yang berkaitan pada *Public Affairs, Public Interest dan Public Value*. Berikut merupakan profil lulusan AP:

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulus AP	Deskripsi
PL1	Aparatur Sipil Negara	Lulusan mampu berkontribusi sebagai abdi negara pada bidang keahlian seperti manajemen dan kebijakan public.
PL2	Manajer Birokrasi public:	Lulusan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahliannya baik pada tingkat operasional maupun tingkat manajerial utamanya pada urusan public.
PL3	Politisi atau Anggota Legislatif:	Lulusan mampu berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan public.

PL4	Analisis dan Perumus kebijakan :	Lulusan mampu memberi masukan maupun merancang Kebijakan publik dan pembuatan keputusan strategis, baik pada organisasi kemasyarakatan maupun organisasi pemerintahan.
PL5	Konsultan/Fasilitator/ Pengelola kegiatan lapangan:	lulusan mampu mengelola program public yang mengutamakan nilai- nilai kepublikan.
PL6	Peneliti:	Lulusan mampu menghasilkan karya orisinal yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi hingga sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan public.
PL7	Wirausahawan Sosial:	Lulusan Mampu membuka lapangan kerja yang dapat menyelesaikan masalah public dengan cara cara inovatif dan tetap mengutamakan nilai-nilai public. Profesi ini menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat.
PL8	Akademisi:	Lulusan mampu berkontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan, pengabdian masyarakat serta penelitian.

5.2. Perumusan CPL

Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) diuraikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	
Sikap	
S1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
S3	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

S5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S6	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S9	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
S10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Ketrampilan Umum	
KU1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
KU4	mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
KU6	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
KU7	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

KU8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
KU9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KETRAMPILAN KHUSUS	
KK1	Mampu menganalisis interaksi antar actor dalam governance publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan public, baik lokal maupun nasional, dalam aspek sosial ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik.
KK2	Mampu mengidentifikasi kepentingan public dalam siklus kebijakan public, baik ditingkat lokal maupun nasional.
KK3	Mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan public dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif (a.l.cost benefit analysis, analytical hierarchy process) dan metode kualitatif (a.l.participatory impact analysis, studi kasus) dalam seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi).
KK4	Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analsis kebijakan yang berupa catatan kebijakan (policy memo), uraian kebijakan (policy brief), atau kertas kerja kebijakan (policy paper) untuk menghasilkan draf kebijakan.
KK5	Mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan public minimal dengan menggunakan media sosial.
KK6	Mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumberdaya, melaksanakan dan evaluasi) kegiatan dalam rangka mengimplementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
KK7	Mampu menganalisis resiko dan melaksanakan program mitigasi resiko terhadap implementasi kebijakan.
KK8	Mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan public.
PENGETAHUAN	

PP1	Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi publik.
PP2	Menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik dan teori sosial.
PP3	Menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik.
PP4	Menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan.
PP5	Menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan

5.3. MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN

Tabel 3. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi

CPL Prodi		PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8
Sikap									
S1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	√	√	√	√	√	√	√	√
S2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;	√	√	√	√	√	√	√	√
S3	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	√	√	√	√	√	√	√	√
S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	√	√	√	√	√	√	√	√
S5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	√	√	√	√	√	√	√	√
S6	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	√	√	√	√	√	√	√	√
S7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	√	√	√	√	√	√	√	√

S8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;				√		√		√
S9	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	√	√	√	√	√	√	√	√
S10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.					√		√	
Ketrampilan Umum									
KU1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	√	√	√	√	√	√	√	√
KU2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	√	√	√	√	√	√	√	√
KU3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;	√	√	√	√	√	√	√	√
KU4	mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	□	√	□	√	□	√	□	

KU5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	√	√	√	√	√	√	√	√
KU6	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	√	√	√	√	√	√	√	√
KU7	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	√	√	□	√	√	√	√	√
KU8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	√	√	□	√	√	√	√	√
KU9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	√	√	□	√	√	√	□	√
Ketrampilan Khusus									
KK1	Mampu menganalisis interaksi antar actor dalam governance publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan public, baik lokal maupun nasional, dalam aspek sosial ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik.	√	√	√	√	√	√	□	√

KK2	Mampu mengidentifikasi kepentingan public dalam siklus kebijakan public, baik ditingkat lokal maupun nasional.	√	√	√	√	√	√	√	√
KK3	Mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan public dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif (a.l.cost benefit analysis, analytical hierarchy process) dan metode kualitatif (a.l.participatory impact analysis, studi kasus) dalam seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi).	√	√	√	√	□	√	□	√
KK4	Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan (policy memo), uraian kebijakan (policy brief), atau kertas kerja kebijakan (policy paper) untuk menghasilkan draf kebijakan.	√	√	√	√	□	√	□	√
KK5	Mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan public minimal dengan menggunakan media sosial.	√	√	√	√	√	√	□	√
KK6	Mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumberdaya, melaksanakan dan evaluasi) kegiatan dalam rangka mengimplementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik.	√	√	√	√	□	√	□	√
KK7	Mampu menganalisis resiko dan melaksanakan program mitigasi resiko terhadap implementasi kebijakan.	√	√	√	√	√	√	□	√

KK8	Mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan public.	√	√	√	√	√	√	√	√
Pengetahuan									
PP1	Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi publik.	√	√	√	√	√	√	□	√
PP2	Menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik dan teori sosial.	√	√	√	√	√	√	√	√
PP3	Menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik.	√	√	√	√	√	√	√	√
PP4	Menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan.	√	√	□	√	√	√	□	√
PP5	Menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan	√	√	√	√	√	√	√	√

V. PENENTUAN BAHAN KAJIAN

6.1. GAMBARAN BODY of KNOWLEDGE (BoK)

Bahan kajian dapat diartikan sebagai tafsir/mazhab program studi ap fisip untad berkaitan dengan dimensi/aspek objek formal ilmu administrasi publik diwujudkan dalam bentuk garis besar program pembelajaran kajian program studi dalam konteks pendekatan klasik, kontemporer/kekinian danantisipasi masa depan isu-isu administrasi publik. Adapun bahan kajian tersebut meliputi:

1. Pengembangan Kepribadian
2. Humaniora
3. Lingkup Administrasi Publik
4. Kebijakan Publik
5. Manajemen Publik
6. Perencanaan Sektor Publik
7. Metode Penelitian
8. Teori Organisasi
9. Collaborative Governance
10. Inovasi & Reformasi Sektor Publik
11. Teori Pembangunan
12. Pengembangan Keterampilan

6.2. DESKRIPSI BAHAN KAJIAN

Tabel 4. Bahan Kajian (BK)

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian	Mata Kuliah
BK1	Pengembangan Kepribadian		Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi
BK2	Humaniora		Pengantar Administrasi Pengantar Ilmu Politik Pengantar Sosiologi Pengantar Antropologi
BK3	Lingkup Adm Publik		Teori Adm Publik Filsafat Ilmu Filsafat Administrasi Etika Administrasi Publik Hukum Administrasi

			Publik Ekologi Administrasi Publik
BK4	Kebijakan Publik		Pengantar Kebijakan Publik Isu-Isu Kebijakan Lokal (KP) Formulasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (KP) Analisis Kebijakan (KP) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik(KP)
BK5	Manajemen Publik		Pengantar Manajemen Publik Azas-Azas Manajemen Perencanaan Keuangan Publik Manajemen Pelayanan Publik (MP) Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik (MP) Manajemen Stratejik Sektor Publik (MP) Management Resiko Sektor Publik (MP)
BK6	Perencanaan Sektor Publik		Teknik dan Metode Pemetaan Sosial (PP) Perencanaan Program Publik (PP) Analisa Jejaring Aktor Pada Program Publik (PP) Monitoring & Evaluasi Program Publik (PP)
BK7	Metode Penelitian		Metode Penelitian Sosial Metode Penelitian Administrasi

			Statistik untuk Adm. Publik
BK8	Teori Organisasi		Teori Organisasi Prilaku Organisasi Kepemimpinan Metode Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan Manajemen Sumber Daya Manusia
BK9	Collaborative Governance		Birokrasi dan Governansi Publik Sistem Informasi Manajemen Big Data & Digital Governance Manajemen Kemitraan Lembaga Publik-Privat
BK10	Inovasi & Reformasi Sektor Publik		Inovasi & Reformasi Administrasi Publik Perbandingan Administrasi Negara Sistem Administrasi Negara Indonesia
BK11	Teori Pembangunan		Teori Pembangunan Ekonomi Publik Administrasi Pembangunan Manajemen Pembangunan Daerah & Desa Community Development & CSR Kajian Lingkungan Hidup
BK12	Pengembangan Keterampilan		Ko-Kurikuler-I/Pengembangan Bakat Ko-Kurikuler-II/Persiapan karir Kewirausahaan

VI. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Tabel 5. Matrik CPL dan Mata kuliah Baru)**

No	MK	CPL Sikap										CPL Pengetahuan					CPL Ketrampilan Khusus								CPL Ketrampilan Umum													
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	P1	P2	P3	P4	P5	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KU1	KU2	KU3	KU4	KU5	KU6	KU7	KU8	KU9					
Semester-1																																						
1	Pendidikan Pancasila	√			√							√												√	√													
2	Pendidikan Agama	√	√									√												√	√													
3	Pendidikan Kewarganegaraan	√			√	√									√						√	√		√	√													
4	Pendidikan Bahasa Indonesia			√	√										√					√								√										
5	Bahasa Inggris			√	√										√					√	√							√										
6	Pengantar Ilmu Administrasi						√	√				√							√		√	√							√									
7	Pengantar Ilmu Politik			√	√							√						√							√													
8	Pengantar Sosiologi					√	√					√					√	√							√													
9	Ko-Kurikulum-I/Pengembangan Bakat								√	√					√					√										√								
Semester-2																																						
1	Pengantar Antropologi		√			√						√									√	√					√											
2	Pengantar Manajemen Publik					√			√			√							√		√	√			√					√								
3	Pengantar Kebijakan Publik					√	√					√						√						√	√					√								
4	Azas-Azas manajemen					√			√			√								√										√								
5	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi		√					√				√					√							√	√		√	√					√	√				
6	Kajian Lingkungan Hidup				√	√						√										√			√	√	√	√										
7	Filsafat Ilmu		√			√						√												√			√			√								
8	Ko-Kurikulum-II/Persiapan karir					√				√					√					√										√	√							
Semester-3																																						
1	Filsafat Administrasi																																					
2	Metode Penelitian Sosial		√					√					√						√									√						√				
3	Statistik untuk Adm. Publik		√					√					√						√						√									√				
4	Ekonomi Publik			√			√						√						√						√					√								
5	Sistem Administrasi Negara Indonesia				√			√				√					√				√						√											
6	Administrasi Pembangunan					√						√			√				√					√			√											
7	Teori Organisasi						√		√			√								√				√				√		√	√							
8	Birokrasi dan Governansi Publik			√			√					√								√							√											
Semester-4																																						
1	Metode Penelitian Administrasi			√				√					√						√										√					√				
2	Teori Pembangunan		√			√							√				√							√														
3	Kepemimpinan								√			√												√					√	√								
4	Teori Administrasi Publik					√						√							√					√					√									
5	Inovasi & Reformasi Administrasi Publik			√								√						√			√			√		√												
6	Sistem Informasi Manajemen			√								√								√						√		√										
7	Etika Administrasi Publik		√			√						√						√								√								√				
8	Hukum Administrasi Negara					√	√					√								√									√									
Semester-5																																						
1	Perencanaan Keuangan Publik		√				√					√					√														√	√						
2	Ekologi Administrasi Publik			√	√							√					√							√														
3	Perbandingan Administrasi Negara				√			√				√									√	√		√		√												
4	Kewirausahaan								√	√			√								√		√									√	√	√				
5	Manajemen Sumber Daya Manusia					√			√			√								√										√	√	√	√					
6	Prilaku Organisasi		√			√		√				√								√	√							√	√	√	√	√	√					
7	Metode Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan					√	√								√								√	√				√		√								
8	Manajemen Pembangunan Daerah & Desa		√	√								√					√							√		√		√										
Semester-6																																						
1	Community Development & CSR			√						√			√								√			√					√									
2	Big Data & Digital Governance			√	√							√								√	√						√		√									
3	Manajemen Kemitraan Lembaga Publik			√			√					√								√	√						√		√	√								
4	Manajemen Pelayanan Publik (MP)		√		√							√								√	√					√						√						
5	Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik				√							√					√													√								
6	Manajemen Stratejik Sektor Publik (MP)					√	√							√						√	√						√		√									
7	Management Resiko Sektor Publik (MP)			√							√									√	√						√		√									
8	Isu-Isu Kebijakan Lokal (KP)			√			√						√							√	√			√		√		√										
9	Formulasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (KP)			√			√					√							√		√			√		√		√										
10	Analisis Kebijakan (KP)		√				√						√							√	√			√				√										
11	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik(KP)		√			√						√								√	√			√									√					
12	Teknik dan Metode Pemetaan Sosial (PP)						√		√					√			√	√								√			√									
13	Perencanaan Program Publik (PP)		√	√								√								√						√												
14	Analisa Jejaring Aktor Pada Program Publik (PP)					√	√						√				√									√					√			√				
15	Monitoring & Evaluasi Program Publik (PP)		√	√											√				√					√					√		√							
16	Seminar Rencana Penelitian								√	√					√					√									√					√				
Semester-7																																						
1	Kuliah Kerja Nyata (KKN)			√				√							√						√							√						√				
Semester-8																																						
1	Skripsi			√				√							√					√								√										

VII. STRUKTUR MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI

Struktur kurikulum Program Studi Administrasi Publik terdiri atas Mata Kuliah Wajib & Konsentrasi/Peminatan. Adapun Mata Kuliah dan bobot SKS terangkum dalam tabel berikut:

NO.	Kelompok Mata kuliah	Jumlah SKS
1.	Mata kuliah Universitas terangkum dalam kelompok Mata Kuliah <i>Pengembangan Kepribadian</i> – diberi kode MKWU	25 SKS Wajib
2.	Mata kuliah Fakultas terangkum dalam kelompok Mata Kuliah <i>Keilmuan dan Keterampilan</i> – diberi kode MKWF	14 SKS Wajib
3.	Mata kuliah Program Studi Ilmu Administrasi Publik terangkum dalam kelompok Mata Kuliah <i>Keahlian Berkarya</i> dan Mata Kuliah <i>Perilaku Berkarya</i> – diberi kode MKWP-MK Konsentrasi	Total 107 SKS, terdiri: - 95 SKS Wajib - 12 SKS Peminatan
	Jumlah	146 SKS – Wajib lulus minimal

a. Matrik Kurikulum

Tabel 6. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4		
			MK Wajib		MKWN
			Fakultas	Prodi	
VIII	6	1	-	-	B01161004, SKRIPSI, 6 SKS.
VII	4	1	-	-	B01161003 Kuliah Kerja Nyata (KKN), 4 SKS.
VI	23	8	-	B02161015 Community Development & CSR, 3 SKS, B02161029 Big Data & Digital Governance, 3 SKS, B02161028 Manajemen Kemitraan Lembaga Publik-Privat, 3 SKS, B02161035 Manajemen Pelayanan Publik (MP), 3 SKS, B02161036 Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik (MP), 3 SKS, B02161037	-

				Manajemen Stratejik Sektor Publik (MP), 3 SKS, B02161038 Management Resiko Sektor Publik (MP), 3 SKS, B02161034 Isu-Isu Kebijakan Lokal (KP), 3 SKS, B02161033 Formulasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (KP), 3 SKS, B02161031 Analisis Kebijakan (KP), 3 SKS, B02161032 Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik(KP), 3 SKS, Teknik dan Metode Pemetaan Sosial (PP), 3 SKS, Perencanaan Program Publik (PP), 3 SKS, Analisa Jejaring Aktor Pada Program Publik (PP), 3 SKS, Monitoring & Evaluasi Program Publik (PP), 3 SKS, Seminar Rencana Penelitian, 2 SKS.	
V	24	8	-	B02161022, Perencanaan Keuangan Publik, 3 SKS B02161023, Ekologi Adm Publik, 3 SKS, B02161024 Perbandingan Administrasi Negara, 3 SKS, B02161025 Manajemen Sumber Daya Manusia, 3 SKS, B02161026 Prilaku Organisasi, 3 SKS, B02161027 Metode Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan, 3 SKS, B02161030 Manajemen Pembangunan Daerah & Desa, 3 SKS.	U00131007 Kewirausahaan, 3 SKS.
IV	24	8	-	B02161018 Metode Penelitian Administrasi, 3 SKS, B02161009 Teori Pembangunan, 3 SKS, B02161008 Kepemimpinan, 3 SKS, B02161006 Teori Administrasi Publik, 3 SKS, B02161019 Inovasi & Reformasi Administrasi Publik, 3 SKS, B02161012 Sistem Informasi Manajemen, 3 SKS, B02161020 Etika Administrasi Publik, 3 SKS,	-

III	24	7	-	B02161017 Metode Penelitian Sosial, 3 SKS, B02161010 Statistik untuk Adm. Publik, 3 SKS, B02161013 Ekonomi Publik, 3 SKS, B02161011 Sistem Administrasi Negara Indonesia, 3 SKS, B02161014 Administrasi Pembangunan, 3 SKS, B02161007 Teori Organisasi, 3 SKS, B02161016 Birokrasi dan Governansi Publik, 3 SKS.	-
II	20	8	B03111001 Pengantar Antropologi, 3 SKS, B01161002 Ko-Kurikuler-II/Persiapan karir, 1 SKS.	01161002 Pengantar Manajemen Publik, 3 SKS, B01161003 Pengantar Kebijakan Publik, 3 SKS, B01161005 Azas-Azas manajemen, 3 SKS, B 02 16 1 039 Filsafat Ilmu , 3 SKS,.	B U 00 13 1 005 Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, 2 SKS, U 00 13 1 008 Kajian Lingkungan Hidup, 2 SKS.
I	21	9	B01161001 Ko-Kurikuler-I/Pengembangan Bakat, 1 SKS, B02151001 Pengantar Sosiologi, 3 SKS, B05161002 Pengantar Ilmu Politik, 3 SKS.	B02161001 Pengantar Ilmu Administrasi, 3 SKS.	U 0013 1 002 Pendidikan Pancasila, 2 SKS, U 0013 1 001 Pendidikan Agama, 3 SKS, U 0013 1 004 Pendidikan Kewarganegaraan, 2 SKS, U 0013 1 003 Pendidikan Bahasa Indonesia, 2 SKS, U 0013 1 009 Bahasa Inggris, 2SKS,
Total	146	50			

Catatan:

Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) masing dg bobot minimal 2 sks:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

VIII. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER

Untuk dapat lulus dari Program Sarjana Administrasi Publik maka mahasiswa harus menyelesaikan minimal 146 SKS yang terbagi ke dalam 8 semester. Berikut merupakan rincian Mata Kuliah:

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Per Semester-I

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-1					
1	U 0013 1 002	Pendidikan Pancasila	2		2
2	U 0013 1 001	Pendidikan Agama	3		3
3	U 0013 1 004	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2
4	U 0013 1 003	Pendidikan Bahasa Indonesia	2		2
5	U 0013 1 009	Bahasa Inggris	2		2
6	B02161001	Pengantar Ilmu Adminsitasi	3		3
7	B05161002	Pengantar Ilmu Politik	3		3
8	B02151001	Pengantar Sosiologi	3		3
9	B01161001	Ko-Kurikuler-I/Pengembangan Bakat		1	1
Jumlah Beban Studi Semester I			20	1	21

Tabel 8. Daftar Mata Kuliah Per Semester-II

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-1					
1	B03111001	Pengantar Antropologi	3		3
2	B01161002	Pengantar Manajemen Publik	3		3
3	B01161003	Pengantar Kebijakan Publik	3		3
4	B01161005	Azas-Azas manajemen	3		3
5	U 00 13 1 005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2		2
6	U 00 13 1 008	Kajian Lingkungan Hidup	2		2
7	B 02 16 1 039	Filsafat Ilmu	3		3
8	B01161002	Ko-Kurikuler-II/Persiapan karir		1	1
Jumlah Beban Studi Semester II			19	1	20

Tabel 9 Daftar Mata Kuliah Per Semester-III

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-III					
1	B02161004	Filsafat Administrasi	3		3
2	B02161017	Metode Penelitian Sosial	2	1	3
3	B02161010	Statistik untuk Adm. Publik	2	1	3
4	B02161013	Ekonomi Publik	3		3
5	B02161011	Sistem Administrasi Negara Indonesia	3		3
6	B02161014	Administrasi Pembangunan	3		3
7	B02161007	Teori Organisasi	3		3
8	B02161016	Birokrasi dan Governansi Publik	3		3
Jumlah Beban Studi Semester III			22	2	24

Tabel 10 Daftar Mata Kuliah Per Semester-IV

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-IV					
1	B02161018	Metode Penelitian Administrasi	2	1	3
2	B02161009	Teori Pembangunan	3		3
3	B02161008	Kepemimpinan	3		3
4	B02161006	Teori Administrasi Publik	3		3
5	B02161019	Inovasi & Reformasi Administrasi Publik	3		3
6	B02161012	Sistem Informasi Manajemen	3		3
7	B02161020	Etika Administrasi Publik	3		3
8	B02161021	Hukum Administrasi Negara	3		3
Jumlah Beban Studi Semester IV			23	1	24

Tabel 11 Daftar Mata Kuliah Per Semester-V

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-V					
1	B02161022	Perencanaan Keuangan Publik	3		3
2	B02161023	Ekologi Administrasi Publik	3		3
3	B02161024	Perbandingan Administrasi Negara	3		3
4	U00131007	Kewirausahaan	2	1	3
5	B02161025	Manajemen Sumber Daya Manusia	3		3
6	B02161026	Prilaku Organisasi	3		3
7	B02161027	Metode Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan	3		3
8	B02161030	Manajemen Pembangunan Daerah & Desa	3		3
Jumlah Beban Studi Semester V			23	1	24

Tabel 12 Daftar Mata Kuliah Per Semester-VI

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-VI					
1	B02161015	Community Development & CSR	2	1	3
2	B02161029	Big Data & Digital Governance	3		3
3	B02161028	Manajemen Kemitraan Lembaga Publik-Privat	2	1	3
4	B02161035	Manajemen Pelayanan Publik (MP)	3		3
5	B02161036	Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik (MP)	3		3
6	B02161037	Manajemen Stratejik Sektor Publik (MP)	3		3
7	B02161038	Management Resiko Sektor Publik (MP)	3		3
8	B02161034	Isu-Isu Kebijakan Lokal (KP)	3		3
9	B02161033	Formulasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (KP)	3		3
10	B02161031	Analisis Kebijakan (KP)	3		3
11	B02161032	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik(KP)	3		3
12		Teknik dan Metode Pemetaan Sosial (PP)	3		3
13		Perencanaan Program Publik (PP)	3		3

14		Analisa Jejaring Aktor Pada Program Publik (PP)	3		3
15		Monitoring & Evaluasi Program Publik (PP)	3		3
16		Seminar Rencana Penelitian		2	2
Jumlah Beban Studi Semester VI			19	4	23

Tabel 13 Daftar Mata Kuliah Per Semester-VII & VIII

No	Kode MK	MK	Bobot SKS		Jumlah
			Teori	PPL	
Semester-VII					
1	B01161003	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		4	4
Semester-VIII					
1	B01161004	Skripsi		6	6

IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK			N0. Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
Pengesahan	No. Revisi 03	Jumlah Hal 1-9	Tanggal Penyusunan 19 Juli 2022	
Mata Kuliah (MK) : Analisis Kebijakan	Kode Mata Kuliah B02161031	Rumpun Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Publik	BOBOT (sks) 3 SKS	Semester 5
Program Studi: Ilmu Administrasi Publik	Dosen Pengampu/Penanggung Jawab: 1. Dr. Muhammad Irfan Mufti, M.Si 2. Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si 3. Dr. Intam Kurnia, M.Si. 4. Fiki Ferianto, S.Sos.,MPA		Koord Prodi Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si	
Matakuliah Prasyarat	: -			
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	:			

	1. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (S7). 2. Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi public (P1) 3. Mampu menganalisis interaksi antar actor dalam governance publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan public, baik lokal maupun nasional, dalam aspek sosial ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik. (KU1) 4. Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan (policy memo), uraian kebijakan (policy brief), atau kertas kerja kebijakan (policy paper) untuk menghasilkan draf kebijakan. (KU4) 5. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KK1);
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	Setelah mengikuti mata kuliah analisis kebijakan, mahasiswa mampu: 1. Memahami ruang lingkup dan design kebijakan 2. Mendemonstrasikan definisi barang publik dan kepentingan public dalam analisis kebijakan 3. Melakukan analisis kebijakan dengan metode sederhana meliputi identifikasi masalah kebijakan, peramalan, penetapan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan. 4. Menyusun dokumen kebijakan
Deskripsi Matakuliah	: Pada Mata Kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai macam konsep terkait Metode pengambilan keputusan yang terdiri dari <i>Barang Publik (Public goods)</i>, <i>Kepentingan Publik (Public interest)</i>, <i>Proses Analisis Kebijakan (The Process of Policy Analysis)</i>; Analisis Kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan (<i>Policy Analysis in the policymaking process</i>); Metode Analisis

	Kebijakan: Penataan Masalah Kebijakan (<i>structuring policy problem</i>); Peramalan Outcome Kebijakan (<i>Forecasting Expected Policy Outcome</i>); Menetapkan pilihan Kebijakan (<i>Prescripting Preferred Policies</i>); Monitoring outcome kebijakan (<i>Monitoring observed policy outcome</i>); Evaluasi Kinerja Kebijakan (<i>Evaluating Policy Performance</i>); Dokumen Analisis Kebijakan (Policy memo, Policy Brief, Policy Paper, Policy Poster)
Materi Pembelajaran	: PB-1 Pengantar Perkuliahan dan Konsep dasar analisis kebijakan PB-2 Barang Publik (<i>Public Goods</i>) PB-3 Kepentingan Publik (<i>Public Interest</i>) PB-4 Proses Analisis Kebijakan (<i>The Process of Policy Analysis</i>) PB-5 Analisis Kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan (<i>Policy Analysis in the policymaking process</i>) PB-6 Metode Analisis Kebijakan: Penataan Masalah Kebijakan (<i>structuring policy problem</i>) PB-7 Peramalan Outcome Kebijakan (<i>Forecasting Expected Policy Outcome</i>) PB-8 UTS PB-9 Menetapkan pilihan Kebijakan (<i>Prescripting Preferred Policies</i>) PB-10 Monitoring outcome kebijakan (<i>Monitoring observed policy outcomes</i>) PB-11 Evaluasi Kinerja Kebijakan (<i>Evaluating Policy Performance</i>) PB-12 Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Memo & Policy Brief</i> PB-13 Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Paper</i> PB-14 Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Poster</i> PB-15 Studi Kasus PB-16 UAS

Pert Ke	Kemampuan Yang Diharapkan (SUB-CPMK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Strategi/Bentuk/ Metode Pembelajaran		Pustaka	Waktu (Menit)	Pengalaman Belajar	Bobot Pen
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1. Mahasiswa mampu memahami capaian pembelajaran mata kuliah 2. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dalam analisis kebijakan	Ketepatan dalam menjelaskan analisis kebijakan	Pengantar Perkuliahan dan Konsep dasar analisis kebijakan	Ceramah dan Tanya Jawab	-	DR1, DR 2, DR10	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian memberikan rangkuman materi pertemuan	4
2	Mahasiswa mampu mengenali defenisi dan	Ketepatan dalam memahami defenisi dan	Barang Publik (<i>Public Goods</i>)	Ceramah, Tanya Jawab dan		DR1, DR 2, DR10	3x50 Menit	Menyelesaikan Tugas 1 di LMS Pertemuan	4

	jenis barang publik	jenis barang publik		Penugasan				Kedua (Individu)	
3	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kepentingan dan urusan-urusan public	Ketepatan dalam menelaan kepentingan dan urusan publik	Kepentingan dan urusan Publik (<i>Public Interest</i>)	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok		DR 1, DR 10	3x50 Menit	Ikut terlibat dalam diskusi kelompok	6
4	Mahasiswa mampu mendefenisikan dan mengilustrasikan fase analisis kebijakan	Ketepatan dalam mendefenisikan dan mengilustrasikan fase analisis kebijakan	Proses Analisis Kebijakan (<i>The Process of Policy Analysis</i>)	Studi Kasus		DR 7	3x50 Menit	Ikut terlibat dalam diskusi kelompok	4
5	- Memahami analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual yang tertanam dalam proses sosial	Ketepatan dalam memahami proses pembuatan kebijakan dan	Analisis Kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan (<i>Policy Analysis in</i>	Ceramah dan Studi Kasus		DR 7	3x50 Menit	Ikut terlibat dalam diskusi kelompok	4

	- mendeskripsikan pembuatan kebijakan sebagai proses yang kompleks dengan berbagai fase perubahan	kompleksitasnya	<i>the policymaking process)</i>						
6	Mahasiswa mampu membedakan struktur masalah dari penyelesaian masalah serta subjektif, sistemik, sifat masalah yang saling bergantung.	Ketepatan dalam membedakan struktur masalah dari penyelesaian masalah serta subjektif, sistemik, sifat masalah yang saling bergantung.	Metode Analisis Kebijakan: Penataan Masalah Kebijakan (<i>structuring policy problem</i>)	Pengantar Singkat dan Diskusi Kelompok		DR 10, DR 11	3x50 Menit	Tugas 2: Membuat analisis masalah kebijakan lokal di Kota Palu dan dipresentasikan	6
7	Mahasiswa membedakan	Ketepatan dalam	Peramalan Outcome	Ceramah dan		DR13	3x50 Menit	Menyelesaikan Tugas 3	6

	ekstrapolasi, prediksi, dan penilaian ahli Memahami efek temporal, historis, dan institusional pada akurasi perkiraan	memetakan resiko perkiraan outcome kebijakan	Kebijakan (<i>Forecasting Expected Policy Outcome</i>)	Penugasan				Membuat ramalan alternative kebijakan beserta outcome yang diharapkan.	
8	UTS								15
9	Mahasiswa mampu memahami kriteria dalam memilih antar dua atau lebih alternative kebijakan secara rasional	Ketepatan dalam memilih alternative kebijakan	Menetapkan pilihan Kebijakan (<i>Prescribing Preferred Policies</i>)	Ceramah dan Simulasi		DR 8	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian memberikan rangkuman materi pertemuan	4
10	Mahasiswa mampu menjelaskan	Ketepatan dalam menganalisis dan	Monitoring outcome kebijakan (<i>Monitoring</i>		Studi Kasus	DR 3,4,5.	3x50 Menit	Menyelesaikan Tugas 4 menyusun instrument	8

	fungsi monitoring serta membedakan input kebijakan, aktivitas, output, outcome dan dampak kebijakan.	mengevaluasi kebijakan	<i>observed policy outcomes</i>)					monitoring kebijakan dengan menentukan aktivitas, output, outcome kebijakan.	
11	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengilustrasikan kriteria untuk mengevaluasi kinerja kebijakan	Ketepatan dalam mengilustrasikan kriteria evaluasi kinerja kebijakan	Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan (<i>Evaluating Policy Performance</i>)	Ceramah dan Simulasi		DR 3,4,5.	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian memberikan rangkuman materi pertemuan	8
12	Mahasiswa mampu menyusun dokumen kebijakan berupa <i>policy Brief & Memo</i>	Kreativitas dan rasionalitas dokumen kebijakan yang disusun dalam	Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Brief & Memo</i>	Ceramah dan Simulasi		DR, 3,4,5	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian ikut terlibat dalam simulasi	4

		merespon masalah publik						penyusunan Policy Brief & Memo	
13	Mahasiswa mampu menyusun dokumen kebijakan berupa <i>policy Paper</i>	Kreativitas dan rasionalitas dokumen kebijakan yang disusun dalam merespon masalah publik	Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Paper</i>	Ceramah dan Simulasi		DR 9	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian ikut terlibat dalam simulasi penyusunan Policy Paper	4
14	Mahasiswa mampu menyusun dokumen kebijakan berupa <i>policy Poster</i>	Kreativitas dan rasionalitas dokumen kebijakan yang disusun dalam merespon masalah publik	Dokumen Analisis Kebijakan : <i>Policy Poster</i>	Ceramah dan Simulasi		DR 12	3x50 Menit	Mahasiswa menerima materi kemudian ikut terlibat dalam simulasi penyusunan Policy Poster	4

15	Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu publik dan mendesain rencana dokumen kebijakannya	Ketepatan dalam menganalisis isu-isu publik dan mendesain rencana dokumen kebijakannya	Studi Kasus: isu-isu publik dan design dokumen kebijakan		Studi Kasus	DR 12	3x50 Menit	Tugas 5: Mahasiswa menyelesaikan tugas pembuatan dokumen kebijakan mengenai analisis terhadap permasalahan kebijakan di tingkat lokal	4
16	UAS						3x50 Menit		15

Daftar Referensi:

1. Anderson, J. E. 1979. Public Policy Making. NY: Holt, Rinehart and Winston.
2. Dunn, William N. 2018. Public Policy Analysis: An Integrated Approach Sixth edition, New York: Routledge,
3. Dye Thomas R. 1987. Understanding Public Policy, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Inc.
4. Hogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn.1984. Policy Analyzing for The Real World, Oxford University Press, New York.
5. Howlett and Ramesh. 1955. Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press.
6. Irfan Islamy. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
7. Jones, Charles, O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Alih Bahasa Ricky Istamto, Rajawali Pers, Jakarta.
8. K.Gupta, Dipak. 2001. Analyzing Public Policy: Concepts, Tools, and Technique, State University San Diego.

9. Lester, J. and Stewart, Jr. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. Australia, etc.: Wadsworth
10. M. Darwin, Muhadjir, MPA. Dr. 2005., Negara dan Perempuan, Grha Guru, Yogyakarta.
11. Nugroho D., Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Gramedia, Jakarta.
12. Subarsono, Drs. AG, M.Si., M A. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
13. Weimer, David L. & Aidan R. Vining. 1992. Policy Analysis: Concepts and Practice, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Inc.
14. Wibawa, Samudra., 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Intermedia Jakarta.

X. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. DISKUSI DAN PRESENTASI

No	Penilaian			Bobot
	Strategi	Bentuk	Instrumen	
1	Presentasi makalah dan diskusi	Penilaian proses dan Produk	Lembar Penilaian presentase dan Produk (makalah)	10%
2	Presentasi Laporan Studi Kasus: (Pengkajian s/d Kriteria hasil) dan diskusi	Penilaian proses dan Produk	Lembar Penilaian presentase dan Produk 1) Policy Brief 2) Policy Paper	10% 10%

2. TUGAS MAHASISWA (T)

Pertemuan Ke-	Bahan Kajian	Tugas	Waktu	Hasil Tugas & Kriteria Penilaian
2	Menyelesaikan Tugas 1 di LMS Pertemuan Kedua (Individu)	Mandiri	48 Jam	PPT
6	Tugas 2: Membuat analisis masalah kebijakan lokal di Kota Palu dan dipresentasikan	Kelompok	48 Jam	PPT
7	Menyelesaikan Tugas 3 Membuat ramalan alternative kebijakan beserta outcome yang diharapkan.	Kelompok	48 Jam	PPT
10	Menyelesaikan Tugas 4 menyusun instrument monitoring kebijakan dengan menentukan aktivitas, output, outcome kebijakan	Kelompok	48 Jam	PPT
15	Tugas 5: Mahasiswa menyelesaikan tugas pembuatan dokumen kebijakan mengenai	Kelompok	48 Jam	Laporan Akhir

	analisis terhadap permasalahan kebijakan di tingkat lokal			
--	---	--	--	--

3. UJIAN TENGAH SEMESTER(UTS)

No Soal	Penilaian			Bobot
	Strategi	Bentuk	Instrumen	
1	Mini Riset/Team Based Project	Penilaian Produk	Terlampir	15%

4. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No Soal	Penilaian			Bobot
	Strategi	Bentuk	Instrumen	
1	Mini Riset/Team Based Project	Penilaian Produk	Terlampir	15%

5. BOBOT PENILAIAN

No	Nama Mahasiswa	Absen	Tugas Terstruktur	Case Method	TBP	Total
		10%	35%	25%	30%	100%
Nilai Kumulatif		A= 86-100	A-= 81-85	B+=76-80	B- = 61-70	Her : <61

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan juli tahun 2022 Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Analisis Kebijakan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah diverifikasi oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.

Mengetahui
Ketua Program Studi/Ketua Jurusan

Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si;
NIP 196509111992031002

Palu,.....
Dosen Pengampu/
Penanggung Jawab MK

Dr. Muhammad Irfan Mufti, M.Si,
NIP: 196810211992031001

Contoh Lembar Penilaian

JUDUL MAKALAH			
NAMA KELOMPOK PENYAJI			
NIM/NAMA ANGGOTA PENYAJI	1		
	2		
	3		
	4		

FASE	ASPEK	SKOR			
Pendahuluan	1. Menyampaikan tujuan dari presentasi	4	3	2	1
	2. Menghubungkan topik dengan pengetahuan lain yang relevan	4	3	2	1
Kegiatan Inti	3. Signifikansi [Kesesuaian/kebermaknaan topik yang dibahas]	4	3	2	1
	4. Pemahaman [Pemahaman terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah yang disajikan]	4	3	2	1
	5. Argumentasi [Alasan yang diberikan terkait permasalahan yang dibicarakan]	4	3	2	1
	6. Responsifness [Kesesuaian jawaban yang diberikan dengan pertanyaan yang muncul]	4	3	2	1
	7. Penampilan [Rasa percaya diri dalam mempresentasikan makalahnya]	4	3	2	1
	8. Penyajian [Menyajikan materi secara sistematis dan runtut]	4	3	2	1
Penutup	9. Memberikan Rangkuman/kesimpulan	4	3	2	1
	10. Memberikan Penguatan	4	3	2	1
11. Kemenarikan presentasi		4	3	2	1
12. Kerjasama		4	3	2	1
Skor Rerata					

Rubrik Penskoran Penilaian Presentasi.

Skor	Aspek yang Dinilai
4	Jika aspek ini dirumuskan sesuai dengan uraian deskripsi pada kolom uraian aspek yang diamati
3	Jika aspek ini dirumuskan sebagian besar seperti uraian pada deskripsi aspek yang diamati, tetapi ada sebagian kecil yang tidak memenuhi kriteria
2	Jika aspek ini dirumuskan hanya sebagian kecil memenuhi kriteria pada deskripsi aspek, sebagian besar tidak memenuhi
1	Aspek ini dirumuskan sama sekali berbeda dengan deskripsi yang ditentukan

Yang Menilai

(_____)

XI. IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER

Dalam rangka mengimplementasikan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No.8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Tadulako, maka program studi menetapkan beberapa kebijakan diantaranya Hak MBKM dapat diambil minimal pada semester 3-5 dengan jumlah 20-60 SKS. Adapun rincian pembagian

15.1. MODEL IMPLEMENTASI MBKM

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana 145 sks							
Smt-1	Smt-2	Smt-3	Smt-4	Smt-5	Smt-6	Smt-7	Smt-8
21 sks	20 sks	24 sks	24 sks	24 sks	23 sks	4 sks	6 sks
MKWU MK-Prodi di dlm Prodi	MKWU MK-Prodi di dlm Prodi	MKWU MK-Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MKWU MK-Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MK-Prodi di dlm & luar & Belajar di luar PT	MK-Prodi di dlm Prodi	Kegiatan belajar diluar kampus: Magang/ KKNT	MK-Prodi di dlm & TA

15.2. MATA KULIAH (MK) YANG WAJIB DITEMPUH DI DALAM PRODI SENDIRI

No	Kode MK	MK	SKS	Ket
1	U 0013 1 002	Pendidikan Pancasila	2	MKWU
2	U 0013 1 001	Pendidikan Agama	3	MKWU
3	U 0013 1 004	Pendidikan Kewarganegaraan	2	MKWU
4	U 0013 1 003	Pendidikan Bahasa Indonesia	2	MKWU
5	U 0013 1 009	Bahasa Inggris	2	MKWU
6	B02161001	Pengantar Ilmu Administrasi	3	MKWF
7	B05161002	Pengantar Ilmu Politik	3	MKWF
8	B02151001	Pengantar Sosiologi	3	MKWF
9	B01161001	Ko-Kurikuler-I/Pengembangan Bakat	1	MKWF
10	B03111001	Pengantar Antropologi	3	MKWF
11	B01161002	Pengantar Manajemen Publik	3	MKWP
12	B01161003	Pengantar Kebijakan Publik	3	MKWP
13	B01161005	Azas-Azas manajemen	3	MKWP
14	U 00 13 1 005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2	MKWU
15	U 00 13 1 008	Kajian Lingkungan Hidup	2	MKWU
16	B 02 16 1 039	Filsafat Ilmu	3	MKWP
17	B01161002	Ko-Kurikuler-II/Persiapan karir	1	MKWF

18	B02161004	Filsafat Administrasi	3	MKWP/MBKM
19	B02161017	Metode Penelitian Sosial	3	MKWP
20	B02161010	Statistik untuk Adm. Publik	3	MKWP
21	B02161013	Ekonomi Publik	3	MKWP/MBKM
22	B02161011	Sistem Administrasi Negara Indonesia	3	MKWP
23	B02161014	Administrasi Pembangunan	3	MKWP/MBKM
24	B02161007	Teori Organisasi	3	MKWP/MBKM
25	B02161016	Birokrasi dan Governansi Publik	3	MKWP
26	B02161018	Metode Penelitian Administrasi	3	MKWP
27	B02161009	Teori Pembangunan	3	MKWP/MBKM
28	B02161008	Kepemimpinan	3	MKWP/MBKM
29	B02161006	Teori Administrasi Publik	3	MKWP
30	B02161019	Inovasi & Reformasi Administrasi Publik	3	MKWP
31	B02161012	Sistem Informasi Manajemen	3	MKWP/MBKM
32	B02161020	Etika Administrasi Publik	3	MKWP
33	B02161021	Hukum Administrasi Negara	3	MKWP
34	B02161022	Perencanaan Keuangan Publik	3	MKWP
35	B02161023	Ekologi Administrasi Publik	3	MKWP
36	B02161024	Perbandingan Administrasi Negara	3	MKWP
37	U00131007	Kewirausahaan	3	MKWP/MBKM
38	B02161025	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	MKWP/MBKM
39	B02161026	Prilaku Organisasi	3	MKWP/MBKM
40	B02161027	Metode Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan	3	MKWP
41	B02161030	Manajemen Pembangunan Daerah & Desa	3	MKWP
42	B02161015	Community Development & CSR	3	MKWP
43	B02161029	Big Data & Digital Governance	3	MKWP
44	B02161028	Manajemen Kemitraan Lembaga Publik-Privat	3	MKWP
45	B02161035	Manajemen Pelayanan Publik (MP)	3	MK-Konsentrasi
46	B02161036	Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik (MP)	3	MK-Konsentrasi
47	B02161037	Manajemen Stratejik Sektor Publik (MP)	3	MK-Konsentrasi
48	B02161038	Management Resiko Sektor Publik (MP)	3	MK-Konsentrasi

49	B02161034	Isu-Isu Kebijakan Lokal (KP)	3	MK-Konsentrasi
50	B02161033	Formulasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (KP)	3	MK-Konsentrasi
51	B02161031	Analisis Kebijakan (KP)	3	MK-Konsentrasi
52	B02161032	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik(KP)	3	MK-Konsentrasi
53		Teknik dan Metode Pemetaan Sosial (PP)	3	MK-Konsentrasi
54		Perencanaan Program Publik (PP)	3	MK-Konsentrasi
55		Analisa Jejaring Aktor Pada Program Publik (PP)	3	MK-Konsentrasi
56		Monitoring & Evaluasi Program Publik (PP)	3	MK-Konsentrasi
57		Seminar Rencana Penelitian	2	MKWP
58	B01161003	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	MKWU
59	B01161004	Skripsi	6	MKWU
Bobot Total SKS			146	

15.3. PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI

No	Menempuh MK	Bobot sks maksimum	Keterangan
1	Di luar PRODI di dalam kampus	6	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
2	Di PRODI yg sama di luar Kampus	9	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi/himpunan PRODI sejenis.
3	Di PRODI yg berbeda di luar Kampus	3	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
Total bobot sks maksimum		12	

15.4. BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARA DI LUAR PERGURUAN TINGGI

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dg bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	Magang/Praktek Kerja	2	≤20	Kegiatan Magang MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
2	KKN/KKNT	2	≤20	Kegiatan KKNT MBKM yg merupakan perpanjangan KKN-Reguler dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
3	Wirausaha	2	≤20	Kegiatan Wirausaha MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
4	Asisten mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP)	4	≤20	Kegiatan AMSP MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
5	Penelitian/Riset		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
6	Studi/Proyek Independen		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
7	Proyek kemanusiaan		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.

XII. PENUTUP

Demikian Kurikulum ini disusun dengan harapan mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Publik kedepannya dapat mencapai Kualifikasi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

Palu, 23 November 2022

Ketua Tim Penyusun